

**KAJIAN TERHADAP AKTA PERIKATAN JUAL BELI DAN AKTA  
KUASA MENJUAL YANG DIBUAT BERDASARKAN  
HUBUNGAN HUKUM HUTANG PIUTANG  
DI KABUPATEN BANTUL**

Zainal Abidin<sup>1</sup>, Ari Hernawan<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis konstruksi Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat berdasarkan hubungan hukum hutang piutang pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Btl dan untuk mengetahui dan menganalisis alasan Notaris yang membuat Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat berdasarkan hubungan hukum hutang piutang pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Btl di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan (jenis) yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan atas penelitian lapangan dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan serta literatur atau pendapat para ahli yang menerangkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tersebut, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hukum dalam perkara 28/Pdt.G/PN Btl adalah adanya hubungan hukum hutang piutang yang kemudian terhadapnya dikemas dalam bentuk Akta Perikatan Jual Beli LUNAS (PJB LUNAS) Nomor : 169 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 170, tertanggal 26 Desember 2016 tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari debitur yang mana hal tersebut mengakibatkan kecacatan terhadap salah satu dari syarat-syarat sahnya perjanjian sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Penyebab atau motivasi Notaris membuat Akta Perikatan Jual Beli LUNAS (PJB LUNAS) Nomor : 169 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 170, tertanggal 26 Desember 2016 yang dibuat berdasarkan hubungan hukum hutang piutang pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Btl diduga kuat karena ingin mendapatkan honorarium (uang) atau dengan kata lain ingin memiliki penghasilan yang lebih.

Kata Kunci : Akta Perikatan Jual Beli, Kuasa Menjual, Hutang Piutang

---

<sup>1</sup> Rukun Pertiwi Gendeng GK IV/971i Baciro Gondokusuman Yogyakarta 55225

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**THE STUDY OF SALE PURCHASE CONTRACT DEED AND SELLING  
AUTHORIZATION DEED BASED ON RECEIVABLE  
AND LIABILITY LAW RELATION  
IN BANTUL DISTRICT**

Zainal Abidin<sup>3</sup>, Ari Hernawan<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

This study aims to examine and analyze the construction of the sale purchase association deed and selling power deed based on receivable and liability law relation based on the decision case number 28 / Pdt.G / 2017 / pn btl and to find out and analyze the reasons for the notary to make the sale purchase association deed and selling power deed based on receivable and liability law relation based on the decision case number 28 / Pdt.G / 2017 / pn btl.

On this study, the researcher uses an empirical juridical approach, which is based on field research and also equipped with library research and literature or opinions from the experts who explain or describe the legislation. The data is then processed and analyzed qualitatively and presented descriptively .

The results of the study show that law construction in case number 28 / Pdt.G / 2017 / pn btl is a receivable and liability law relation which is then packaged in the form of LUNAS Sale and Purchase Deed Number: 169 and Deed of Selling Authorization Number: 170, dated 26 December 2016 without the knowledge or consent of the debtor which results in a defect in one of the legal terms of the agreement so that the agreement can be canceled. The motivation of the Notary to make LUNAS Selling and Purchase Deed (PJB LUNAS) Number: 169 and the Deed of Selling Authorization Number: 170, dated December 26, 2016 which is made based on the receivable and liability law in Case No. 28 / Pdt.G / 2017 strongly suspected because he wants to get an honorarium (money) or in other words want to have more income.

**Key Words:** Sale Purchase Contract Deed, Selling Authorization, Receivable And Liability

---

<sup>3</sup> Rukun Pertiwi Gendeng GK IV/971i Baciro Gondokusuman Yogyakarta 55225

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta